Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 8946 – 8950 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

DAMPAK DARI BLOKADE GULF COOPERATION COUNCIL (GCC) TERHADAP QATAR DALAM PERSIAPAN MENJADI TUAN RUMAH PIALA DUNIA 2022

Zarina[1], Saeri[2], Umi Oktyari Retnaningsih[3]
Universitas Riau, Riau
e-mail: zarina.arin23@gmail.com

Abstract: *This article examines how Qatar responded to the 2017–2021 blockade imposed by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and Egypt while preparing to host the 2022 FIFA World Cup. It uses a qualitative descriptive approach and library research, drawing on secondary sources including scholarly literature, official documents, and reputable reports. The analysis finds that Qatar combined domestic resilience measures with external diplomatic diversification. It redirected trade and aviation routes, strengthened cooperation with Turkey and Iran, and maintained strategic engagement with the United States. These measures reduced the blockade's capacity to disrupt essential supplies and World Cup preparations. The tournament also served as a platform for public diplomacy and national branding, while the Al-Ula Declaration in January 2021 restored regional relations before the event. Qatar's experience shows that a mega sporting event can reinforce soft power when supported by economic adaptation and diplomatic flexibility, although claims about lasting economic transformation require longer-term evaluation.*

Keywords*: Qatar; blockade; soft power; sports diplomacy; FIFA World Cup 2022*

Abstrak: Artikel ini menganalisis cara Qatar menghadapi blokade yang diberlakukan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir pada 2017–2021 ketika mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka dengan sumber sekunder berupa literatur ilmiah, dokumen resmi, serta laporan lembaga dan media tepercaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Qatar menggabungkan ketahanan domestik dengan diversifikasi diplomasi eksternal. Qatar mengalihkan jalur perdagangan dan penerbangan, memperkuat kerja sama dengan Turki dan Iran, serta mempertahankan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Langkah tersebut mengurangi kemampuan blokade untuk mengganggu pasokan penting dan persiapan Piala Dunia. Turnamen kemudian dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi publik dan pencitraan negara, sementara Deklarasi Al-Ula pada Januari 2021 memulihkan hubungan regional sebelum penyelenggaraan. Pengalaman Qatar memperlihatkan bahwa mega-event olahraga dapat memperkuat soft power apabila didukung adaptasi ekonomi dan keluwesan diplomatik, meskipun dampak transformasi ekonomi jangka panjang masih perlu dievaluasi.

Kata kunci: Qatar; blokade; soft power; diplomasi olahraga; Piala Dunia FIFA 2022

PENDAHULUAN

Olahraga internasional telah berkembang menjadi arena yang mempertemukan kepentingan politik, ekonomi, dan identitas nasional. Mega-event olahraga seperti Piala Dunia FIFA memberi negara tuan rumah kesempatan untuk menarik perhatian global, membangun jejaring, dan menyampaikan citra tertentu kepada khalayak internasional. Dalam hubungan internasional, daya tarik budaya dan kebijakan dapat menjadi sumber pengaruh ketika negara mampu membuat pihak lain menerima agenda atau identitasnya tanpa

paksaan (Nye, 2004). Karena itu, penyelenggaraan Piala Dunia dapat dibaca sebagai bagian dari diplomasi publik dan strategi soft power, selain sebagai kegiatan olahraga dan ekonomi (Murray & Pigman, 2014).

Qatar memperoleh hak menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 pada 2010. Penyelenggaraan ini memiliki arti simbolik karena menjadi Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Bagi Qatar, turnamen tersebut berkelindan dengan strategi pembangunan, promosi pariwisata, dan penguatan posisi internasional. Namun, persiapan berlangsung di tengah ketegangan regional. Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dan membatasi akses darat, udara, serta laut. Blokade berlangsung sekitar tiga setengah tahun dan menimbulkan risiko terhadap rantai pasok, mobilitas, dan proyek infrastruktur yang diperlukan untuk turnamen.

Krisis tersebut tidak hanya menyangkut hubungan bilateral. Ia mencerminkan persaingan mengenai orientasi kebijakan luar negeri Qatar, hubungan Doha dengan Iran, dukungan terhadap kelompok politik tertentu, serta keberadaan media Al Jazeera. Kuartet Arab menyampaikan 13 tuntutan sebagai syarat untuk mengakhiri krisis; Qatar menolak tuntutan yang dipandang mencampuri kedaulatan dan kebijakan domestiknya (Associated Press, 2017). Dalam konteks ini, keberlangsungan persiapan Piala Dunia menjadi salah satu ukuran kemampuan Qatar mempertahankan ruang kebijakan dan mengelola tekanan regional.

Kajian mengenai diplomasi olahraga dan soft power telah membahas fungsi mega-event dalam membentuk citra negara serta memperluas pengaruh internasional (Grix, 2014; Henderson, 2014). Sementara itu, studi tentang krisis Teluk menyoroti diplomasi publik Qatar dan dampak blokade terhadap hubungan regional (Cherkaoui, 2018; Azizah et al., 2023). Artikel ini memusatkan perhatian pada hubungan antara respons Qatar terhadap blokade dan keberlanjutan persiapan Piala Dunia 2022. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana diplomasi dan kebijakan adaptif Qatar membantu menghadapi blokade sekaligus mempertahankan penyelenggaraan turnamen. Analisis juga meninjau pemanfaatan Piala Dunia sebagai sarana soft power serta batas-batas kesimpulan tentang manfaat ekonomi pasca-turnamen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan respons Qatar terhadap blokade dan kaitannya dengan persiapan Piala Dunia 2022. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari sumber sekunder, meliputi buku dan artikel ilmiah tentang diplomasi, soft power, dan olahraga; dokumen pemerintah serta organisasi internasional; dan laporan lembaga serta media yang kredibel. Rentang pembahasan mencakup awal blokade pada 2017, normalisasi hubungan melalui Deklarasi Al-Ula pada 2021, penyelenggaraan Piala Dunia pada 2022, dan informasi pasca-turnamen yang tersedia dalam bahan penelitian.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan data ke dalam tiga tema: dampak blokade terhadap akses dan persiapan turnamen; kebijakan adaptasi domestik dan diversifikasi hubungan eksternal; serta fungsi Piala Dunia sebagai instrumen diplomasi publik dan pembangunan citra. Informasi antarsumber dibandingkan untuk melihat konsistensi kronologi dan argumen. Kerangka soft power Joseph Nye digunakan untuk membaca daya tarik, nilai, budaya, dan kebijakan sebagai sumber pengaruh, sedangkan konsep diplomasi olahraga membantu menjelaskan penggunaan kompetisi internasional untuk mendukung tujuan hubungan luar negeri (Nye, 2004; Murray & Pigman, 2014). Karena penelitian ini

berbasis data sekunder, temuan menjelaskan pola kebijakan dan proses diplomatik, bukan mengukur dampak kausal secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Blokade dan kerentanan persiapan Piala Dunia

Pemutusan hubungan pada Juni 2017 menutup satu-satunya perbatasan darat Qatar dengan Arab Saudi dan membatasi penerbangan Qatar Airways melintasi wilayah udara negara-negara Kuartet. Kebijakan tersebut menciptakan tekanan langsung pada distribusi barang, perjalanan, dan logistik konstruksi. Sebelum krisis, sebagian kebutuhan pangan dan barang konsumsi Qatar dipenuhi melalui negara-negara tetangga. Jalur darat juga penting untuk pengiriman bahan bangunan. Dengan demikian, blokade meningkatkan biaya penyesuaian dan memperbesar ketidakpastian bagi persiapan turnamen.

Tekanan politik turut menyentuh status Qatar sebagai tuan rumah. Sejumlah pernyataan publik dan kampanye media mempertanyakan kemampuan Qatar menyelenggarakan turnamen, sementara isu pencabutan hak tuan rumah muncul dalam wacana regional. Hal ini memperlihatkan bahwa status Piala Dunia menjadi sumber prestise sekaligus titik tekan geopolitik. Akan tetapi, tuntutan resmi Kuartet mencakup isu yang lebih luas, seperti hubungan Qatar dengan Iran, keberadaan pangkalan militer Turki, dan Al Jazeera. Qatar menolak tuntutan tersebut dan memandangnya sebagai pembatasan atas kebijakan luar negeri yang berdaulat.

Blokade tidak serta-merta menghentikan pembangunan. Sebaliknya, Qatar mengarahkan kembali perdagangan melalui pelabuhan Oman dan memperluas jalur pasok dari mitra lain. Perubahan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap konektivitas dapat mendorong negara yang diblokade mempercepat diversifikasi. Namun, penyesuaian tersebut tetap memerlukan biaya, koordinasi logistik, dan kapasitas fiskal yang besar. Karena itu, kemampuan Qatar bertahan tidak dapat dijelaskan hanya oleh diplomasi; sumber daya ekonomi dan kelembagaan domestik juga menjadi prasyarat penting.

Adaptasi domestik dan diversifikasi diplomasi

Qatar merespons gangguan dengan mengamankan pasokan kebutuhan pokok, mengembangkan kapasitas produksi domestik, serta mengalihkan rute perdagangan dan penerbangan. Penerbangan yang sebelumnya menggunakan wilayah udara negara-negara Kuartet dialihkan, termasuk melalui Iran. Kerja sama ekonomi dan logistik dengan Turki juga semakin penting, sementara hubungan dengan Iran mengalami penguatan praktis karena kedekatan geografis dan kebutuhan transit. Kebijakan tersebut tidak menghapus ketergantungan Qatar pada jaringan internasional, tetapi mengurangi ketergantungan pada koridor yang dapat dikendalikan pihak pemblokade.

Diversifikasi hubungan berjalan berdampingan dengan pemeliharaan kemitraan keamanan dan diplomatik yang telah ada. Qatar terus berkomunikasi dengan Amerika Serikat dan memanfaatkan peran mediasi Kuwait serta dukungan diplomatik dari mitra internasional. Strategi ini memperlihatkan diplomasi berlapis: mempertahankan penolakan terhadap tuntutan yang dianggap melanggar kedaulatan, memperluas alternatif kerja sama, dan menjaga kanal negosiasi agar krisis tidak berubah menjadi konfrontasi terbuka. Pendekatan tersebut sejalan dengan diplomasi sebagai pengelolaan hubungan dan negosiasi untuk mengamankan kepentingan negara (Barston, 1997).

Dalam perspektif soft power, respons Qatar juga mencakup komunikasi internasional dan pembentukan narasi bahwa negara tersebut tetap stabil serta mampu menyelenggarakan ajang global. Soft power tidak semata-mata lahir dari

keberhasilan sebuah acara, tetapi dari daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan yang dipersepsikan kredibel oleh pihak luar (Nye, 2004). Oleh sebab itu, keberlangsungan pembangunan stadion dan infrastruktur berfungsi sebagai sinyal kapasitas negara, sementara keterbukaan terhadap pengunjung dan partisipasi global menjadi saluran diplomasi publik. Strategi ini membantu Qatar mempertahankan legitimasi sebagai tuan rumah, meskipun persoalan hak pekerja migran dan kritik atas kondisi penyelenggaraan tetap menjadi tantangan reputasi (Al Thani, 2021).

Normalisasi hubungan dan penyelenggaraan turnamen

Pada 5 Januari 2021, para pemimpin negara GCC menyepakati Deklarasi Al-Ula yang membuka jalan bagi pemulihan hubungan Qatar dengan Arab Saudi dan negara-negara lain dalam Kuartet. Kesepakatan tersebut mengakhiri isolasi regional sebelum Piala Dunia berlangsung. Normalisasi tidak berarti seluruh perbedaan kebijakan luar negeri telah hilang, tetapi memulihkan konektivitas dan mengurangi risiko politik terhadap penyelenggaraan. Mediasi Kuwait dan Amerika Serikat menjadi bagian penting dari proses tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian krisis memerlukan kombinasi kepentingan regional dan fasilitasi eksternal.

Piala Dunia 2022 kemudian terlaksana di Qatar. Penyelenggaraan turnamen menegaskan bahwa blokade gagal mencegah Qatar mempertahankan hak tuan rumah dan menuntaskan persiapan. Keberhasilan ini dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara ketahanan ekonomi, adaptasi rantai pasok, diplomasi dengan mitra alternatif, dan pemulihan hubungan regional. Menjelaskan hasil hanya melalui soft power akan mengabaikan kemampuan material Qatar; sebaliknya, melihatnya hanya sebagai kekuatan ekonomi akan melewatkan fungsi simbolik dan diplomatik dari penyelenggaraan acara.

Mega-event memberi Qatar panggung untuk memperkenalkan negara kepada audiens global dan memperkuat branding sebagai pusat olahraga, perjalanan, dan kegiatan internasional. Kajian tentang penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar menekankan adanya peluang ekonomi dan reputasi, sekaligus tantangan sosial serta tata kelola (Henderson, 2014). Karena itu, dampak diplomatik tidak otomatis identik dengan penerimaan positif. Perhatian global dapat meningkatkan visibilitas, tetapi juga memperbesar pengawasan terhadap kebijakan domestik dan praktik penyelenggaraan. Soft power bergantung pada bagaimana pesan dan tindakan negara diterima, bukan semata-mata pada skala investasi atau besarnya jumlah penonton.

Legacy ekonomi dan batas klaim transformasi

Pasca-turnamen, fasilitas transportasi, hotel, kawasan perkotaan, dan stadion berpotensi menjadi aset bagi pariwisata serta penyelenggaraan acara internasional berikutnya. Pemerintah Qatar mengaitkan investasi tersebut dengan visi diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor non-hidrokarbon. Penggunaan berkelanjutan fasilitas menjadi faktor penentu apakah belanja besar untuk turnamen akan menghasilkan manfaat jangka panjang atau menyisakan aset yang kurang termanfaatkan. Literatur mega-event menekankan pentingnya perencanaan legacy sejak awal, karena manfaat tidak muncul otomatis dari status tuan rumah (Grix, 2014).

Data yang dihimpun dalam tesis menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan setelah turnamen, tetapi angka dan periode pelaporan antar-sumber perlu diseragamkan sebelum digunakan sebagai bukti dampak kausal. Lonjakan kunjungan juga dipengaruhi kebijakan visa, kalender acara, kondisi perjalanan global, dan tren pariwisata regional. Oleh sebab itu, artikel ini menempatkan Piala Dunia sebagai katalis dan sarana promosi, bukan sebagai satu-satunya penyebab

perubahan ekonomi. Penilaian yang lebih kuat memerlukan deret waktu yang konsisten, pembandingan dengan tren sebelum turnamen, serta pengukuran kontribusi bersih sektor pariwisata dan pemanfaatan fasilitas.

SIMPULAN

Qatar menghadapi blokade Kuartet Arab dengan menggabungkan adaptasi domestik dan diversifikasi diplomasi. Pengalihan jalur logistik dan penerbangan, perluasan kerja sama dengan Turki dan Iran, pemeliharaan hubungan strategis dengan Amerika Serikat, serta keterlibatan dalam proses mediasi membantu mengurangi tekanan terhadap kebutuhan pokok dan persiapan Piala Dunia 2022. Deklarasi Al-Ula memulihkan hubungan regional sebelum turnamen, sedangkan penyelenggaraan Piala Dunia memperkuat visibilitas dan diplomasi publik Qatar. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa mega-event dapat mendukung soft power ketika ditopang kapasitas material dan diplomasi yang fleksibel. Namun, keberhasilan menjadi tuan rumah tidak dengan sendirinya membuktikan transformasi ekonomi jangka panjang; manfaat legacy tetap bergantung pada pemanfaatan aset dan evaluasi data yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Associated Press. (2017, June 23). What are the 13 demands given to Qatar to end the regional crisis? Gulf News. https://gulfnews.com/world/gulf/qatar/what-are-the-13-demands-given-to-qatar-1.2048118

Azizah, N. A., Putranti, R. I., & Hanura, M. (2023). Gulf Cooperation Council (GCC) sebagai organisasi antar-pemerintah regional di kawasan Teluk Persia dalam menangani krisis diplomasi Qatar-Arab Saudi. Journal of International Relations, 9(1), 189–208.

Barston, R. P. (1997). Modern diplomacy. Addison Wesley Longman.

Cherkaoui, T. (2018). Qatar's public diplomacy, international branding, and the Gulf crisis. Rising Powers Quarterly, 3(3), 127–149.

Grix, J. (2014). Leveraging legacies from sports mega-events. Palgrave Macmillan.

Henderson, J. C. (2014). Hosting the 2022 FIFA World Cup: Opportunities and challenges for Qatar. Journal of Sport & Tourism, 19(1), 57–81.

Murray, S., & Pigman, G. A. (2014). Mapping the relationship between international sport and diplomacy. Sport in Society, 17(9), 1098–1114.

Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Al Thani, M. (2021). Channelling soft power: The Qatar 2022 World Cup, migrant workers, and international image. The International Journal of the History of Sport, 38(11), 1113–1132.